

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Freeman, (2010), tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pemegang saham (shareholders); ia juga menjangkau semua pihak yang bergantung pada kelangsungan perusahaan, termasuk investor, kreditur, karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Bila diterapkan pada pelaporan keberlanjutan, teori ini memperkirakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih peka terhadap kebutuhan informasi pemangku kepentingan, sehingga laporan keberlanjutannya cenderung lebih berkualitas. Dewan komisaris yang independen dan beragam, misalnya, cenderung mendorong pengungkapan yang lebih menyeluruh demi meraih dukungan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Teori inilah yang melandasi hipotesis tentang pengaruh Board Size, Board Independence, dan Board Gender Diversity terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.1.2. Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Dowling & Pfeffer, (1975) menjelaskan, bahwa perusahaan berupaya mendapatkan dan mempertahankan legitimasi sosial dengan menyesuaikan kegiatannya pada norma dan ekspektasi masyarakat. Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat legitimasi, sebab lewat laporan itu komitmen dan hasil kerja keberlanjutan disampaikan kepada publik. Perusahaan yang tata kelolanya baik dipandang lebih kredibel dan bertanggung jawab, sehingga terdorong menyusun laporan yang lebih substantif demi memperkuat legitimasinya. Dengan begitu, komisaris independen dan komite audit yang aktif menjaga agar laporan keberlanjutan tidak berhenti sebagai pencitraan, melainkan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dasar teoretis inilah yang menopang hipotesis bahwa Audit Committee Size berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

2.1.3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan relasi kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), yaitu ketika pemilik melimpahkan wewenang mengelola perusahaan kepada manajemen. Terpisahnya kepemilikan dari pengendalian menimbulkan asimetri informasi dan benturan kepentingan, karena manajemen lebih banyak tahu dan bisa saja bertindak tidak selaras dengan kepentingan pemilik maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk meredamnya diperlukan pengawasan (*monitoring*) yang efektif. Di Indonesia, tugas pengawasan itu dipegang oleh Dewan Komisaris bersama komite-komite di bawahnya, termasuk Komite Audit. Laporan keberlanjutan yang berkualitas juga mengecilkan kesenjangan informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Teori ini mendasari hipotesis mengenai pengaruh Board Independence, Audit Committee Size, Audit Committee Financial Expertise, dan Audit Committee Meeting terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.1.4. Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*)

Resource Dependence Theory Pfeffer & Salancik, (1978) melihat perusahaan sebagai pihak yang bergantung pada sumber daya dari luar untuk bertahan dan berkembang, dengan dewan sebagai penyalur sumber daya itu. Para anggota

dewan membawa pengetahuan, keahlian, pengalaman, jaringan, dan legitimasi. Makin besar dan makin beragam komposisi dewan, makin kaya sumber daya yang dapat dipakai perusahaan, termasuk untuk memahami dan menanggapi tuntutan keberlanjutan dari lingkungan luar. Teori ini mendasari hipotesis mengenai pengaruh Board Size, Board Gender Diversity, dan Board Expertise terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.1.5. Teori Eselon Atas (*Upper Echelons Theory*)

Menurut *Upper Echelons Theory* Hambrick & Mason, (1984), keputusan dan kinerja organisasi mencerminkan ciri-ciri pemimpin puncaknya. Ciri yang dapat diamati, seperti pendidikan, pengalaman, usia, dan gender, membentuk cara pemimpin membaca informasi dan memutuskan sesuatu. Dalam penelitian ini, latar pendidikan dan gender anggota Dewan Komisaris diduga memengaruhi cara dewan mengawasi serta mendorong pengungkapan keberlanjutan. Fitriyani & Soewarno, (2024) juga memanfaatkan teori ini untuk menerangkan dampak latar pendidikan dan keahlian keuangan anggota dewan pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Teori ini mendasari hipotesis mengenai pengaruh Board Gender Diversity dan Board Expertise terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.1.6. Sustainability Reporting Quality (SRQ)

Sustainability Reporting Quality (SRQ) menunjukkan sejauh mana laporan keberlanjutan perusahaan relevan, menyeluruh, akurat, dapat dibandingkan, dan bebas bias, sehingga sungguh membantu penggunaanya mengambil keputusan. Tidak seperti indeks pengungkapan (*disclosure index*) yang sekadar mencatat ada atau tidaknya suatu butir informasi, SRQ dipandang sebagai konsep multidimensi yang meliputi kredibilitas laporan, kelengkapan isi, dan cara informasi disajikan. Pengukuran SRQ dalam penelitian ini memakai skala yang dikembangkan oleh Loza Adauí, (2020), yang memuat 23 indikator dalam tiga dimensi.

Dimensi pertama, kredibilitas (*credibility*), terdiri atas sembilan indikator yang menilai apakah laporan keberlanjutan layak dipercaya. Indikatornya antara lain pemakaian standar pelaporan keberlanjutan, assurance independen, uraian metodologi pelaporan, analisis materialitas, dialog dan pelibatan pemangku kepentingan, pernyataan manajemen puncak, strategi keberlanjutan, serta keberadaan entitas tata kelola keberlanjutan dalam struktur organisasi.

Dimensi kedua, konten (*content*), terdiri atas sebelas indikator yang menilai kelengkapan isu yang diungkapkan. Isu lingkungan mencakup emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, konsumsi air, dan pengelolaan limbah; isu sosial mencakup isu sosial, ketenagakerjaan, hubungan dengan masyarakat, hak asasi manusia, serta antikorupsi dan penyediaan; sedangkan isu sosial-ekonomi mencakup pemasok dan pelanggan.

Dimensi ketiga, komunikasi (*communication*), terdiri atas tiga indikator yang menilai cara informasi disajikan, yakni lewat tabel, grafik, dan gambar. Tiap indikator diberi nilai dikotomis: 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak. Nilai SRQ dalam penelitian ini adalah proporsi indikator yang diungkapkan, yaitu total skor 23 indikator dibagi 23, sehingga SRQ bergerak dari 0 sampai 1 Loza Adauí, (2020).

Dalam penelitian ini, SRQ ditempatkan sebagai mata rantai antara mekanisme tata kelola dan kontribusi perusahaan terhadap SDGs. Alurnya dimulai dari tata kelola, saat dewan komisaris dan komite audit mengawasi dan membawa kompetensi. Pengawasan dan kompetensi itu menentukan mutu laporan, yaitu kredibilitas, kelengkapan konten, dan cara penyajian informasi Loza Adauí, (2020). Laporan yang bermutu kemudian menjadi informasi yang bermanfaat bagi

keputusan pemangku kepentingan, serta memungkinkan akuntabilitas dan pemantauan kontribusi korporasi pada SDGs. Sebaliknya, laporan yang ada tetapi bermutu rendah tidak dapat diverifikasi dan rawan menjadi sarana pencitraan (*greenwashing*) Delmas et al., (2011).

Hubungan itu dapat diuraikan dalam tiga poin. Pertama, SRQ sebagai variabel dependen terkait dengan SDG 12.6, yang mendorong perusahaan, terutama yang berskala besar, memasukkan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan, dan dengan SDG 16.6 tentang institusi yang akuntabel dan transparan United Nations, (2015). Kedua, mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris dan komite audit (X1, X2, X4, X5, X6, dan X7) berkaitan dengan SDG 16.6 melalui fungsi akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, keberagaman gender dewan komisaris (X3) berkaitan dengan SDG 5.5 tentang keikutsertaan penuh perempuan dan peluang memimpin pada tingkat pengambilan keputusan United Nations, (2015). Sampel dari sektor energi, agrikultur, kehutanan, dan kimia pun relevan, sebab aktivitas sektor-sektor tersebut lekat dengan isu iklim dan ekosistem (SDG 13 dan SDG 15) yang menjadi isi utama laporan keberlanjutan mereka United Nations, (2015).

2.1.7. Corporate Governance

Corporate Governance (CG) adalah sistem yang mengatur serta mengendalikan hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lain, dengan tujuan memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Mekanisme CG berperan penting mendorong mutu pengungkapan informasi nonkeuangan, termasuk laporan keberlanjutan. Penelitian ini memproksikan Corporate Governance dengan tujuh mekanisme utama yang merujuk pada Erin et al., (2022):

1. Board Size: banyaknya anggota Dewan Komisaris di suatu perusahaan. Dewan yang lebih besar diperkirakan memiliki ragam keahlian dan pandangan yang lebih luas untuk mengawasi kebijakan pengungkapan perusahaan.
2. Board Independence: perbandingan antara jumlah komisaris independen dan seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen bertugas mengawasi manajemen secara objektif tanpa benturan kepentingan, sehingga mendorong keterbukaan pelaporan.
3. Board Gender Diversity: persentase anggota perempuan dalam Dewan Komisaris. Keberagaman gender diyakini membawa pandangan yang lebih luas serta sikap lebih berhati-hati terhadap isu sosial dan lingkungan saat mengawasi perusahaan.
4. Audit Committee Size: jumlah anggota Komite Audit. Komite audit beranggota memadai diharapkan lebih efektif menjalankan pengawasan pelaporan, termasuk pelaporan keberlanjutan.
5. Board Expertise: latar keahlian anggota Dewan Komisaris yang dilihat dari pendidikan tertinggi di bidang ekonomi, akuntansi, atau keuangan. Dewan yang keahliannya memadai dipercaya lebih paham isi pelaporan keberlanjutan.
6. Audit Committee Financial Expertise: keahlian keuangan anggota Komite Audit, yang dilihat dari pendidikan atau pengalaman di bidang keuangan/akuntansi. Keahlian ini diharapkan menaikkan mutu pengawasan atas pelaporan keberlanjutan.
7. Audit Committee Meeting: banyaknya rapat Komite Audit dalam setahun. Rapat yang makin sering menandakan pengawasan yang makin aktif.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Board Size terhadap Sustainability Reporting Quality

Dewan komisaris beranggota lebih banyak umumnya membawa ragam pengalaman, keahlian, dan jaringan yang lebih luas, sehingga pengawasannya atas kebijakan pelaporan perusahaan lebih menyeluruh. Dalam kacamata Stakeholder Theory, dewan yang besar berpeluang mengakomodasi kepentingan lebih banyak pemangku kepentingan saat memutuskan, termasuk saat memutuskan pengungkapan keberlanjutan. Menurut Resource Dependence Theory, dewan yang besar menyumbangkan lebih banyak keahlian, pengalaman, dan jaringan, sehingga perusahaan lebih sanggup menjawab tuntutan pengungkapan keberlanjutan. Erin et al., (2022) dan Octora & Amin, (2023) menemukan hubungan positif antara ukuran dewan dan kualitas laporan keberlanjutan, meski Saputra & Dewi, (2025) mendapati hasil yang tidak signifikan. Atas dasar itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Board Size berpengaruh positif terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.2.2. Pengaruh Board Independence terhadap Sustainability Reporting Quality

Komisaris independen penting untuk mengawasi manajemen secara objektif karena tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali ataupun manajemen. Legitimacy Theory menyatakan bahwa keberadaan mereka menaikkan kredibilitas pengawasan sehingga pengungkapan keberlanjutan menjadi lebih transparan dan dapat diandalkan. Dari sudut Agency Theory, komisaris independen adalah alat pengawasan yang meredam konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, sebab mereka tidak memiliki kepentingan pribadi atas keputusan manajemen. Pengawasan yang objektif mempersempit asimetri informasi dan mendorong manajemen menyajikan laporan keberlanjutan yang lebih kredibel. Saputra & Dewi, (2025) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Maka, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Board Independence berpengaruh positif terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.2.3. Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Sustainability Reporting Quality

Keberagaman gender di dewan komisaris diyakini memperluas sudut pandang dalam mengambil keputusan, termasuk kepekaan terhadap persoalan sosial dan lingkungan. Anggota dewan perempuan cenderung lebih cermat dan menyeluruh menimbang akibat keputusan perusahaan bagi pemangku kepentingan, selaras dengan prinsip Stakeholder Theory. Menurut Upper Echelons Theory, gender merupakan ciri pemimpin yang memengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan, sedangkan Resource Dependence Theory menganggap keberagaman gender sebagai tambahan sumber perspektif dan pengetahuan bagi dewan. Keberagaman gender dalam penelitian ini hanya diukur pada Dewan Komisaris, tidak pada Direksi, sebab Indonesia memakai sistem dua tingkat (two-tier board) yang menjadikan Dewan Komisaris organ pengawas dan pemberi nasihat bagi Direksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Republik Indonesia, 2007). Fungsi pengawasan inilah yang menjadi fokus, selaras dengan variabel tata kelola lain yang juga diukur pada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Erin et al., (2022) dan Octora & Amin, (2023)

menemukan bahwa adanya perempuan dalam dewan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Dengan demikian, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Board Gender Diversity berpengaruh positif terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.2.4. Pengaruh Audit Committee Size terhadap Sustainability Reporting Quality

Komite audit mengawasi proses pelaporan perusahaan dan memastikan informasi nonkeuangan yang diungkapkan dapat diandalkan. Komite dengan anggota yang cukup banyak diharapkan lebih mampu mengawasi mutu pelaporan keberlanjutan, selaras dengan Legitimacy Theory yang menekankan peran pengawasan dalam menjaga kredibilitas laporan. Selain itu, Agency Theory memandang komite audit sebagai kepanjangan fungsi pengawasan Dewan Komisaris; jumlah anggota yang memadai membuat pembagian tugas pengawasan lebih luas sehingga asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan dapat ditekan. Saputra & Dewi, (2025) serta Dharmawan & Setiawan, (2024) secara konsisten menemukan bahwa adanya komite audit dan aktivitasnya berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Berdasarkan hal itu, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Audit Committee Size berpengaruh positif terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.2.5. Pengaruh Board Expertise terhadap Sustainability Reporting Quality

Dewan komisaris berlatar keahlian ekonomi, akuntansi, atau keuangan diyakini lebih mampu memahami isi dan kerumitan pelaporan keberlanjutan, sehingga pengungkapannya lebih bermutu. Pandangan ini sejalan dengan Upper Echelons Theory, yang menyatakan latar pendidikan membentuk cara anggota dewan memahami informasi dan mengambil keputusan, dan dengan Resource Dependence Theory, yang menganggap keahlian anggota dewan sebagai sumber daya pengetahuan bagi perusahaan. Penelitian Fitriasaki & Soewarno, (2024) menemukan bahwa keahlian keuangan anggota dewan memengaruhi luasnya pengungkapan laporan keberlanjutan, searah dengan temuan Fachriza, (2023) bahwa keahlian dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan sustainability report. Atas dasar itu, hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

H5: Board Expertise berpengaruh positif terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.2.6. Pengaruh Audit Committee Financial Expertise terhadap Sustainability Reporting Quality

Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian keuangan diharapkan lebih sanggup menilai kewajaran dan kredibilitas informasi nonkeuangan, termasuk informasi keberlanjutan. Agency Theory berpendapat bahwa efektivitas pengawasan ditentukan bukan hanya oleh keberadaan komite audit, melainkan juga oleh kompetensi anggotanya. Anggota yang menguasai keuangan lebih mudah mengenali informasi yang keliru atau menyesatkan, sehingga asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan menyusut. Erin et al., (2022) menemukan bahwa audit committee financial expertise berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Atas dasar itu, hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut:

H6: Audit Committee Financial Expertise berpengaruh positif terhadap Sustainability Reporting Quality.

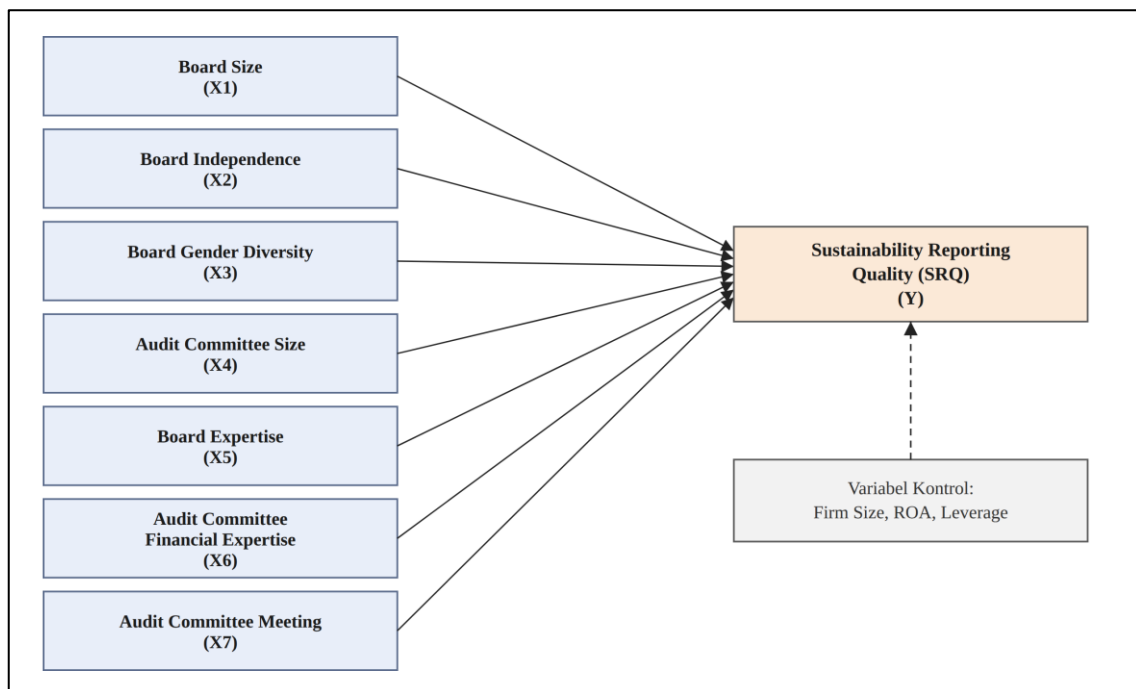
2.2.7. Pengaruh Audit Committee Meeting terhadap Sustainability Reporting Quality

Seberapa sering Komite Audit rapat mencerminkan seberapa aktif pengawasannya terhadap proses pelaporan perusahaan. Rapat yang lebih sering memperbesar peluang komite mengenali dan menindaklanjuti masalah pelaporan, termasuk pelaporan keberlanjutan. Menurut Agency Theory, frekuensi rapat mencerminkan intensitas pengawasan; komite yang lebih sering bertemu punya lebih banyak kesempatan menilai proses pelaporan yang disusun manajemen. Erin et al., (2022) menemukan bahwa audit committee meeting berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan, searah dengan Legitimacy Theory yang menekankan pentingnya aktivitas pengawasan yang berkesinambungan. Atas dasar itu, hipotesis ketujuh dirumuskan sebagai berikut:

H7: Audit Committee Meeting berpengaruh positif terhadap Sustainability Reporting Quality.

2.3. Kerangka Berpikir

Bertolak dari landasan teori dan pengembangan hipotesis di atas, kerangka berpikir disusun dengan menempatkan tujuh mekanisme Corporate Governance (Board Size, Board Independence, Board Gender Diversity, Audit Committee Size, Board Expertise, Audit Committee Financial Expertise, dan Audit Committee Meeting) sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi Sustainability Reporting Quality (SRQ) selaku variabel dependen. Firm Size, Profitability (ROA), dan Leverage ditambahkan sebagai variabel kontrol untuk menyingkirkan efek ciri perusahaan lain, sehingga pengaruh Corporate Governance dapat ditafsirkan lebih tepat.



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh penulis

2.4. Penelitian Terdahulu

Studi-studi terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erin et al., (2022), Corporate Governance and Sustainability Reporting Quality: Evidence from Nigeria	Mengkaji dampak karakteristik dewan komisaris (board size, gender diversity, expertise) dan komite audit (size, expertise, meeting frequency) pada kualitas laporan keberlanjutan.	Kualitas laporan keberlanjutan (indeks skor 0–4, tertinggi bila laporan diaudit pihak eksternal) meningkat secara signifikan seiring board size, gender diversity, board expertise, serta ukuran, keahlian, dan frekuensi rapat komite audit.
2.	Saputra & Dewi, (2025), Determinants of Sustainability Report Quality pada Perusahaan Non-Keuangan di BEI	Mengkaji dampak Corporate Governance dan karakteristik perusahaan pada kualitas laporan keberlanjutan di 50 perusahaan non-keuangan BEI periode 2018–2022.	Komisaris independen dan komite audit terbukti berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keberlanjutan, sedangkan ukuran dewan komisaris (board size) tidak berpengaruh signifikan.
3.	Dharmawan & Setiawan, (2024), Laporan Keberlanjutan yang Berkualitas: Peran Stakeholder Pressure dan Corporate Governance	Menelaah peran Corporate Governance dan tekanan pemangku kepentingan (stakeholder pressure) dalam menentukan kualitas laporan keberlanjutan.	Komite audit terbukti berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keberlanjutan, sedangkan dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
4.	Octora & Amin, (2023), Board Governance, Stakeholder Pressure, dan Sustainability Reporting Quality Perusahaan Manufaktur	Menguji dampak tata kelola dewan (jumlah direksi, komisaris independen, board gender diversity) dan tekanan stakeholder pada kualitas laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur sektor Bahan dan Energi.	Jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kehadiran perempuan di dewan, serta tekanan stakeholder dari lingkungan, karyawan, konsumen, dan investor berdampak positif pada kualitas laporan keberlanjutan.
5.	Suharyani, (2019), Pengaruh Corporate	Menguji kaitan penerapan Corporate	Makin baik penerapan tata kelola perusahaan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Governance terhadap Sustainability Reporting Quality dengan Pendekatan SEM	Governance secara keseluruhan dengan kualitas laporan keberlanjutan memakai Structural Equation Modelling (SEM).	secara keseluruhan, makin baik pula mutu laporan keberlanjutan yang dihasilkan.
6.	Harsono et al., (2024) Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Quality of Sustainability Report Disclosure	Menguji dampak mekanisme GCG pada kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan.	Sebagian mekanisme GCG berdampak positif pada kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, tetapi tidak semua atribut governance yang diuji signifikan.
7.	Solikhah & Winarsih, (2016), Struktur Corporate Governance dan Environmental Disclosure Quality	Menelaah dampak struktur tata kelola perusahaan pada kualitas pengungkapan lingkungan (environmental disclosure) sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan.	Struktur tata kelola perusahaan memengaruhi kualitas pengungkapan lingkungan, walau kekuatan pengaruhnya berbeda antarindikator governance yang diuji.
8.	Sawitri & Ardhiani, (2023), Corporate Governance dan Kualitas Laporan Keberlanjutan: Bukti yang Tidak Konsisten	Menguji ulang dampak Corporate Governance pada kualitas laporan keberlanjutan dalam konteks sampel yang berbeda.	Corporate Governance secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keberlanjutan, sehingga hasilnya tidak konsisten dengan studi-studi sebelumnya.
9.	Fitriasari & Soewarno, (2024), How Board Member's Education Diversities and Financial Expertise Matter to Sustainability Report Disclosure: An Insight from Upper-echelon Theory	Menguji dampak keragaman pendidikan (gelar pascasarjana serta gelar akuntansi dan keuangan) dan keahlian keuangan (sertifikasi profesional akuntansi/keuangan) anggota dewan pada pengungkapan laporan keberlanjutan di 44 perusahaan manufaktur BEI periode 2014-2018 (220 observasi),	Keahlian keuangan anggota dewan berpengaruh positif signifikan pada luasnya pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan latar pendidikan (gelar pascasarjana serta gelar akuntansi dan keuangan) tidak berpengaruh signifikan.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		dengan landasan Upper Echelons Theory.	
10.	Fachriza, (2023), Kualitas Pengungkapan Sustainability Report: Implementasi Corporate Governance pada Perusahaan LQ45	Menguji dampak kepemilikan asing, kepemilikan institusional, keahlian dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit pada kualitas pengungkapan sustainability report di 25 perusahaan LQ45 periode 2019-2021 (75 observasi).	Keahlian dewan komisaris dan ukuran komite audit berdampak positif pada kualitas pengungkapan sustainability report, ukuran dewan direksi berdampak negatif, sedangkan kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak berdampak.
11.	Loza Adaui, (2020), Sustainability Reporting Quality of Peruvian Listed Companies and the Impact of Regulatory Requirements of Sustainability Disclosures	Mengukur kualitas laporan keberlanjutan (SRQ) 27 perusahaan dalam S&P/BVL Peru General Index periode 2014-2016 dengan skala multidimensi 23 indikator (kredibilitas, konten, dan komunikasi), sekaligus menilai efek diberlakukannya regulasi pelaporan keberlanjutan wajib.	SRQ naik konsisten setiap tahun terlepas dari regulasi baru. Dimensi kredibilitas bernilai paling rendah, dan pemakaian assurance independen malah menurun setelah regulasi berlaku.

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari studi-studi terdahulu itu terbaca empat pola. Pertama, mayoritas penelitian, yakni Erin et al., (2022), Saputra & Dewi, (2025), Dharmawan & Setiawan, (2024), dan Octora & Amin, (2023), konsisten menunjukkan bahwa mekanisme Corporate Governance, terutama komisaris independen dan komite audit, memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif. Kedua, efek Board Size terhadap SRQ masih bervariasi: sebagian studi menemukan efek positif, sedangkan yang lain, seperti Saputra & Dewi, (2025), tidak menemukan efek signifikan. Ketiga, ada studi, misalnya Sawitri & Ardhiani, (2023), yang bahkan menyimpulkan bahwa Corporate Governance secara keseluruhan tidak signifikan memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan, sementara Harsono et al., (2024) dan Solikhah & Winarsih, (2016) hanya mendapati efek parsial pada sebagian atribut governance. Keempat, atribut tata kelola yang lebih spesifik, yaitu keahlian dewan komisaris, keahlian keuangan komite audit, dan frekuensi rapat komite audit, dalam beberapa studi terbukti signifikan memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan, di antaranya Fitriyanti & Soewarno, (2024) dan Fachriza, (2023); atribut-atribut itu karenanya layak diuji lebih jauh sebagai perluasan mekanisme Corporate Governance dalam penelitian ini.

Hasil yang tidak konsisten itu menandakan bahwa hubungan Corporate Governance dengan Sustainability Reporting Quality masih perlu diuji, terutama pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ukuran SRQ yang lebih menyeluruh dibanding indeks pengungkapan biasa. Inilah celah penelitian (research gap) yang melandasi studi ini.